Jurnal Segeram

Vol. 4 No 2 2024

MELAYU BARU SEBAGAI FALSAFAH SOSIAL INTEGRASI TRADISI DAN MODERNITAS DALAM PENGUATAN IDENTITAS BUDAYA

Oleh: Azhar Ibrahim
Universitas Nasional Singapura
E-mail: azharibrahim2024@gmail.com

Abstrak

Melayu Baru menawarkan perspektif progresif dalam merespons tantangan globalisasi, menekankan pentingnya integrasi tradisi dan modernitas untuk memperkuat identitas budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen untuk mengeksplorasi konsep Melayu Baru sebagai falsafah sosial. Temuan menunjukkan bahwa adat memiliki peran sentral sebagai instrumen emansipasi dan rekonstruksi sosial. Dengan mengintegrasikan landasan sosiologi budaya, filsafat moral, dan teori modernisasi, Melayu Baru memberikan kerangka holistik yang relevan untuk menjawab tantangan modernitas. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan kebijakan berbasis budaya sebagai respons adaptif terhadap perubahan global.

Kata Kunci: Melayu Baru, falsafah sosial, adat, modernisasi, emansipasi budaya

Abstract

New Malay offers a progressive perspective in responding to the challenges of globalization, emphasizing the importance of integrating tradition and modernity to strengthen cultural identity. This study uses a qualitative approach with document analysis to explore the concept of New Malay as a social philosophy. The findings show that adat has a central role as an instrument of emancipation and social reconstruction. By integrating the foundations of cultural sociology, moral philosophy, and modernization theory, New Malay provides a relevant holistic framework to answer the challenges of modernity. This research recommends the development of culture-based policies as an adaptive response to global change.

Keywords: New Malay, social philosophy, customs, modernization, cultural emancipation

Pendahuluan

Sebagai salah satu komunitas budaya yang kaya akan tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal, masyarakat Melayu telah lama menjadi subjek kajian dalam berbagai disiplin ilmu, seperti antropologi, sosiologi, dan studi budaya. Perjalanan historis masyarakat Melayu mencerminkan adaptasi yang dinamis terhadap berbagai perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang dibawa oleh kolonialisme, modernisasi, dan globalisasi. Namun, di balik kemampuan adaptasi tersebut, muncul tantangan untuk mempertahankan identitas budaya yang autentik di tengah arus modernisasi yang terus berkembang.

Fenomena Globalisasi dan Identitas Budaya

Globalisasi membawa dampak signifikan pada struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, termasuk masyarakat Melayu. Proses ini sering kali menciptakan tekanan terhadap tradisi lokal, memunculkan dominasi nilai-nilai neoliberal yang menekankan individualisme, efisiensi ekonomi, dan homogenisasi budaya (Appadurai, 1996). Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mendasar: bagaimana masyarakat Melayu dapat tetap relevan di tengah modernitas tanpa kehilangan jati diri budaya mereka?

Lahirnya Konsep Melayu Baru

Sebagai respons terhadap tantangan ini, muncul gagasan Melayu Baru yang dikembangkan oleh para intelektual Melayu, seperti Syed Hussein Alatas dan Azhar Ibrahim. Melayu Baru dipandang sebagai falsafah sosial yang tidak hanya menekankan pentingnya modernisasi, tetapi juga integrasi nilai-nilai tradisional sebagai landasan normatif dalam menghadapi dinamika global. Alatas (1977) mengemukakan bahwa Melayu Baru merupakan upaya diagnostik terhadap struktur sosial yang hierarkis dan feodal, sekaligus rekonstruksi sosial menuju masyarakat yang lebih adil dan progresif.

Konsep ini tidak hanya membahas dimensi material seperti pembangunan ekonomi, tetapi juga dimensi moral dan intelektual yang menjadi fondasi transformasi masyarakat. Adat, sebagai salah satu elemen budaya Melayu,

memainkan peran sentral dalam gagasan ini. Azhar Ibrahim (2015) menegaskan bahwa adat tidak hanya merupakan seperangkat aturan sosial, tetapi juga refleksi dari akalbudi kolektif yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Gap Penelitian

Meskipun banyak kajian telah membahas modernisasi dalam masyarakat Melayu, hanya sedikit yang secara eksplisit mengkaji peran adat sebagai instrumen emansipasi dalam kerangka falsafah Melayu Baru. Selain itu, sebagian besar literatur masih terfokus pada aspek teoretis tanpa mengeksplorasi aplikasi praktis konsep ini dalam konteks modernisasi.

Tujuan Penelitian

Tulisan ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji peran adat dalam konsep Melayu Baru sebagai instrumen emansipasi dan rekonstruksi sosial.
2. Mengeksplorasi relevansi Melayu Baru dalam menghadapi tantangan globalisasi.
3. Memberikan perspektif baru tentang bagaimana integrasi tradisi dan modernitas dapat menjadi strategi untuk memperkuat identitas budaya masyarakat Melayu.

Dengan pendekatan ini, artikel berupaya menawarkan kerangka analitis yang tidak hanya relevan bagi masyarakat Melayu, tetapi juga dapat diaplikasikan pada komunitas budaya lain yang menghadapi tekanan serupa akibat modernisasi.

Landasan Relevansi Konsep

Dalam konteks globalisasi, konsep Melayu Baru menawarkan pendekatan unik yang menekankan integrasi tradisi sebagai elemen pembentuk modernitas. Tradisi, dalam hal ini, bukan dipandang sebagai penghalang, tetapi sebagai sumber daya yang memiliki potensi emansipatoris. Menurut Eisenstadt (2000), modernitas dapat dikembangkan dengan mempertahankan elemen-elemen lokal yang menjadi kekuatan budaya masyarakat. Dengan demikian, Melayu Baru memberikan alternatif yang relevan untuk menciptakan modernitas yang lebih inklusif dan berakar pada nilai-nilai lokal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen dan kajian sosiokultural. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan perbandingan dengan literatur akademik relevan.

Isi dan Pembahasan

1. Landasan Teoretis

Konsep Melayu Baru sebagai falsafah sosial bertumpu pada pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan sosiologi budaya, filsafat moral, teori modernisasi, dan potensi emansipatoris dari tradisi. Pendekatan ini menawarkan kerangka analitis untuk memahami bagaimana masyarakat Melayu dapat memadukan tradisi dan modernitas dalam proses rekonstruksi sosial.

Sosiologi Budaya

Dalam sosiologi budaya, adat dipandang sebagai norma kolektif yang mengatur hubungan sosial dan memberikan panduan moral. Menurut Azhar Ibrahim (2015), adat tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan sosial tetapi juga sebagai refleksi dari *akalbudi* masyarakat Melayu. Pendekatan ini menempatkan adat sebagai elemen kunci yang memungkinkan masyarakat Melayu untuk beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensi budaya.

Syed Hussein Alatas (1977) menekankan bahwa adat dalam masyarakat Melayu memiliki tiga kategori:

Pertama, adat yang sebenar adat, yaitu prinsip universal yang bersifat abadi dan menjadi landasan moral. Kedua, Adat yang diadatkan, yaitu norma yang dibentuk melalui konsensus sosial-politik. Ketiga, Adat yang teradat, yaitu aturan yang fleksibel dan dinamis sesuai dengan konteks zaman. Pendekatan ini juga mencakup kritik terhadap struktur sosial feodal yang membatasi mobilitas sosial dan memperburuk ketergantungan ekonomi masyarakat Melayu. Sosiologi budaya, dalam konteks Melayu Baru, menjadi alat untuk mendiagnosis tantangan struktural dan merancang strategi transformasi sosial yang inklusif (Alatas, 1977).

Filsafat Moral dan Akalbudi

Melayu Baru memandang filsafat moral sebagai landasan penting dalam rekonstruksi sosial. Akalbudi, dalam konteks ini, mencakup intelektualitas yang berpadu dengan etika dan komitmen moral. Alatas (1977) menyebutkan bahwa akalbudi adalah upaya untuk menciptakan keseimbangan antara tradisi dan nilai-nilai modern melalui pendidikan dan refleksi moral.

Pemikiran ini sejalan dengan gagasan "Manusia Baru" dari Dmitry Pisarev yang menekankan pentingnya kesadaran sosial, harmoni antara rasionalitas dan emosi, serta usaha kolektif untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Perspektif ini memperlihatkan bahwa transformasi masyarakat Melayu tidak hanya mencakup dimensi material tetapi juga dimensi moral dan intelektual.

Teori Modernisasi

Teori modernisasi dalam Melayu Baru menolak pendekatan konvensional yang sering mengabaikan elemen budaya lokal. Melayu Baru menegaskan bahwa modernisasi harus memperhitungkan tradisi sebagai elemen penting dalam membangun masyarakat modern yang berakar pada nilai-nilai lokal (Eisenstadt, 2000).

Menurut Alatas (1977), hambatan modernisasi dalam masyarakat Melayu seringkali berasal dari warisan feodal dan kolonialisme yang menghambat inovasi dan mobilitas sosial. Oleh karena itu, Melayu Baru menawarkan pendekatan yang mengintegrasikan modernitas dengan tradisi sebagai sumber daya untuk menciptakan inovasi sosial yang relevan.

Tradisi sebagai Alat Emansipasi

Pendekatan teoretis Melayu Baru juga melihat tradisi sebagai instrumen emansipatoris. Azhar Ibrahim (2015) mengemukakan bahwa tradisi, jika diinterpretasikan secara progresif, dapat menjadi alat untuk membebaskan masyarakat dari belenggu struktur sosial yang tidak egaliter.

Konsep "tradisi nan emansipasi" yang diperkenalkan oleh Azhar Ibrahim menekankan bahwa elemen tradisional seperti musyawarah dan gotong royong dapat menjadi dasar untuk membangun masyarakat yang inklusif dan partisipatif.

Tradisi ini memberikan kerangka normatif untuk menciptakan perubahan sosial yang adil dan berkelanjutan.

Relevansi Landasan Teoretis terhadap Melayu Baru

Dengan menggabungkan sosiologi budaya, filsafat moral, teori modernisasi, dan tradisi sebagai alat emansipasi, Melayu Baru menawarkan kerangka yang holistik untuk menghadapi tantangan globalisasi. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat Melayu untuk mempertahankan identitas budaya mereka sambil tetap relevan dalam dunia yang terus berubah. Perspektif ini juga dapat diterapkan pada komunitas budaya lain yang menghadapi tekanan modernitas.

2. Adat sebagai Instrumen Emansipasi

Adat merupakan salah satu elemen utama dalam gagasan Melayu Baru, yang dipandang bukan hanya sebagai tradisi, tetapi juga sebagai alat emansipasi sosial dan budaya. Sebagai konsep yang dinamis, adat memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan inti nilainya. Hal ini menjadikan adat sebagai instrumen penting dalam upaya masyarakat Melayu untuk menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi.

Pengertian Adat dalam Konteks Melayu Baru

Adat tidak hanya sebatas aturan normatif yang mengatur kehidupan sosial, tetapi juga refleksi dari *akalbudi* kolektif masyarakat Melayu. Adat memiliki peran ganda, yakni sebagai penjaga nilai-nilai tradisional dan sebagai alat untuk memandu masyarakat dalam proses perubahan sosial.

Syed Hussein Alatas (1977) mengklasifikasikan adat ke dalam tiga kategori:

1. Adat yang sebenar adat: Prinsip-prinsip universal yang bersifat abadi dan menjadi landasan moral yang tidak terpengaruh oleh perubahan sosial.
2. Adat yang diadatkan: Aturan sosial-politik yang disepakati secara kolektif dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Adat yang teradat: Norma-norma yang fleksibel, yang mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap konteks zaman.

Melalui klasifikasi ini, adat dapat berfungsi sebagai alat emansipasi yang mendorong masyarakat untuk mempertahankan identitas budaya mereka sambil tetap adaptif terhadap modernitas.

Adat sebagai Refleksi Akalbudi

Adat dalam Melayu Baru mencerminkan *akalbudi* masyarakat, yang tidak hanya mengacu pada rasionalitas, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan etika yang membentuk kesadaran kolektif. Akalbudi menjadi kunci untuk memahami adat sebagai sesuatu yang hidup dan terus berkembang.

Akalbudi memungkinkan masyarakat Melayu untuk menggunakan adat sebagai panduan dalam menghadapi tekanan modernitas. Tradisi musyawarah, misalnya, tidak hanya merepresentasikan mekanisme pengambilan keputusan, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dan inklusivitas dalam budaya Melayu.

Emansipasi melalui Tradisi Adat

Dalam konteks emansipasi, adat memiliki potensi untuk membebaskan masyarakat dari struktur sosial yang tidak egaliter. Tradisi seperti *gotong royong* dan *musyawarah* dapat diinterpretasikan secara progresif sebagai kerangka untuk membangun masyarakat yang inklusif dan partisipatif.

Adat yang sebenar adat memiliki potensi emansipatoris yang kuat karena bersandar pada prinsip universal seperti keadilan, kesetaraan, dan kebersamaan. Prinsip ini dapat digunakan untuk melawan struktur feodal yang sering membatasi mobilitas sosial masyarakat Melayu.

Syed Hussein Alatas (1977) juga menggarisbawahi bahwa adat dapat menjadi alat kritik terhadap sistem sosial yang korup dan eksploitatif. Sebagai contoh, adat yang menekankan *Raja Adil Raja Disembah, Raja Zalim Raja Disanggah* mencerminkan komitmen

masyarakat Melayu terhadap prinsip keadilan dalam kepemimpinan.

Relevansi Adat dalam Konteks Modernisasi

Globalisasi dan modernisasi sering kali membawa nilai-nilai neoliberal yang mengikis identitas budaya lokal. Dalam situasi ini, adat menjadi elemen penting yang dapat digunakan untuk menavigasi tantangan global. Dengan memadukan adat yang sebenar adat dan adat yang diadatkan, masyarakat Melayu dapat membangun kerangka normatif yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Tradisi seperti *gotong royong*, jika diterapkan dalam konteks modern, dapat menjadi dasar bagi pembangunan komunitas yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Ibrahim, 2015). Demikian pula, adat musyawarah dapat diadaptasi sebagai model pengambilan keputusan yang demokratis dalam lingkungan sosial-politik yang lebih luas.

Adat sebagai Instrumen Rekonstruksi Sosial

Melayu Baru memandang adat tidak hanya sebagai penjaga nilai-nilai tradisional, tetapi juga sebagai alat untuk merancang rekonstruksi sosial yang lebih adil. Ttradisi adat memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat modern (Ibrahim, 2015)..

Misalnya, konsep adat yang teradat memungkinkan masyarakat untuk menciptakan norma baru yang sesuai dengan tantangan zaman tanpa harus meninggalkan nilai-nilai inti budaya. Dengan demikian, adat menjadi elemen yang dinamis dan relevan dalam proses modernisasi.

Sebagai instrumen emansipasi, adat memiliki peran yang strategis dalam membangun identitas masyarakat Melayu yang adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan memanfaatkan adat sebagai panduan moral dan normatif, Melayu Baru memberikan kerangka untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan progresif.

3. Rekonstruksi Sosial melalui Melayu Baru

Rekonstruksi sosial adalah inti dari konsep Melayu Baru yang dikembangkan untuk membangun masyarakat Melayu yang adaptif terhadap modernitas tanpa kehilangan akar budaya. Melayu Baru, sebagaimana dipaparkan oleh Syed Hussein Alatas dan Azhar Ibrahim, menekankan pentingnya transformasi masyarakat melalui integrasi tradisi dan modernitas. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penguatan ekonomi tetapi juga pada dimensi budaya, moral, dan intelektual yang menjadi landasan masyarakat progresif.

Prinsip Rekonstruksi Sosial

Rekonstruksi sosial melalui Melayu Baru bertumpu pada dua dimensi utama:

a. Diagnosa Sosial Syed Hussein Alatas (1977) menegaskan bahwa upaya rekonstruksi harus dimulai dengan menganalisis tantangan struktural dalam masyarakat Melayu. Feodalisme, yang menjadi ciri dominan struktur sosial masa lalu, telah membatasi mobilitas sosial dan menciptakan ketergantungan pada sistem ekonomi kolonial. Situasi ini menjadi hambatan utama dalam upaya transformasi.
b. Rekonstruksi Berbasis Adat dan Akalbudi Melayu Baru menggunakan adat sebagai panduan moral dan normatif dalam proses rekonstruksi. Azhar Ibrahim (2015) menambahkan bahwa adat yang sebenar adat, yang berlandaskan nilai universal seperti keadilan dan kebersamaan, berperan sebagai prinsip utama dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan partisipatif.
c. Peran Pendidikan dalam Rekonstruksi Pendidikan menjadi salah satu elemen kunci dalam proses rekonstruksi sosial. Azhar Ibrahim (2015) menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat emansipasi yang dapat membebaskan masyarakat dari belenggu dogma tradisional yang tidak relevan. Pendidikan yang berbasis pada *akalbudi* mampu mengintegrasikan tradisi dengan inovasi, menciptakan individu yang tidak hanya terampil secara

intelektual tetapi juga bermoral tinggi.

Dalam kerangka Melayu Baru, pendidikan harus dirancang untuk:

a. Meningkatkan Kesadaran Sosial: Pendidikan diharapkan menciptakan individu yang peka terhadap masalah sosial dan mampu memberikan solusi berbasis nilai-nilai tradisional.
b. Mendorong Kritis terhadap Feodalisme: Dengan menanamkan pemahaman sejarah, pendidikan dapat membantu masyarakat memahami bagaimana struktur feodal membatasi potensi mereka, sehingga mendorong perubahan sosial yang progresif.

Integrasi Tradisi dan Modernitas dalam Rekonstruksi

Melayu Baru menawarkan pendekatan unik dalam modernisasi dengan mempertahankan elemen tradisional sebagai sumber daya untuk inovasi sosial. Tradisi seperti *gotong royong* dan *musyawarah* digunakan sebagai basis dalam membangun komunitas yang inklusif dan berkelanjutan (Milner, 2011).

a. Gotong Royong

   Gotong royong, sebagai tradisi kolektif, memiliki relevansi dalam konteks pembangunan sosial. Dalam masyarakat modern, nilai-nilai ini dapat diterjemahkan menjadi inisiatif komunitas seperti koperasi atau pembangunan berbasis partisipasi.
b. Musyawarah

   Musyawarah tidak hanya menjadi mekanisme pengambilan keputusan tetapi juga mencerminkan prinsip demokrasi dan keadilan. Dalam rekonstruksi sosial, musyawarah dapat menjadi model yang digunakan dalam perumusan kebijakan yang inklusif.

Rekonstruksi Sosial yang Berbasis Keadilan

Melayu Baru menekankan pentingnya menciptakan masyarakat yang adil melalui reformasi sosial. Prinsip *Raja Adil Raja Disembah, Raja Zalim Raja Disanggah* menjadi landasan untuk mengkritik struktur hierarkis yang korup dan tidak adil. Alatas (1977)

mengidentifikasi bahwa keadilan dalam kepemimpinan adalah elemen kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan bermartabat.

Tradisi ini diperkuat dengan pendekatan inklusif yang melibatkan semua lapisan masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan cara ini, Melayu Baru menolak pendekatan pembangunan top-down dan lebih memilih model partisipatif yang menghargai peran komunitas lokal.

Tantangan dan Implikasi Rekonstruksi

Meski menawarkan solusi komprehensif, Melayu Baru juga menghadapi tantangan dalam implementasinya, termasuk:

a. Penetrasi Nilai Neoliberal: Globalisasi sering kali membawa nilai-nilai yang bertentangan dengan adat lokal, seperti individualisme dan materialisme.
b. Kesadaran Masyarakat yang Terbatas: Upaya rekonstruksi sosial membutuhkan peningkatan kesadaran kolektif tentang pentingnya nilai-nilai tradisional sebagai alat emansipasi.

Namun, melalui pendidikan yang inklusif dan reformasi berbasis tradisi, Melayu Baru dapat memberikan panduan praktis untuk mengatasi tantangan ini.

Rekonstruksi sosial melalui Melayu Baru adalah upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan adaptif terhadap modernitas. Dengan mengintegrasikan adat sebagai panduan moral dan pendidikan sebagai alat emansipasi, Melayu Baru memberikan kerangka untuk membangun masyarakat yang progresif tanpa meninggalkan akar budaya.

4. Relevansi dalam Konteks Globalisasi

Globalisasi telah membawa perubahan signifikan pada struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di seluruh dunia, termasuk masyarakat Melayu. Dampaknya tidak hanya terlihat dalam pengaruh nilai-nilai asing, tetapi juga dalam melemahnya identitas budaya lokal akibat homogenisasi yang disebabkan oleh neoliberalisme dan modernitas (Appadurai, 1996). Dalam konteks ini, Melayu Baru hadir sebagai kerangka konseptual yang menawarkan

alternatif melalui integrasi tradisi dan modernitas.

Globalisasi dan Tantangan Identitas Budaya

Globalisasi sering kali diasosiasikan dengan pengaruh dominasi budaya global yang dapat mengikis nilai-nilai lokal. Dalam masyarakat Melayu, modernisasi dan nilai-nilai neoliberal telah menciptakan tekanan besar terhadap adat dan tradisi lokal (Ibrahim, 2015).

Dominasi ini terlihat pada:

a. Individualisme: Pengaruh budaya global cenderung memprioritaskan kepentingan individu daripada kepentingan komunitas, bertentangan dengan nilai-nilai kolektivitas dalam adat Melayu seperti gotong royong.

b. Materialisme: Penekanan pada keberhasilan ekonomi sering kali menggeser nilai moral dan budaya yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Melayu.

c. Homogenisasi Budaya: Identitas budaya lokal terancam oleh pengaruh budaya global yang lebih mendominasi.

Globalisasi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi tetapi juga pada transformasi nilai, mengakibatkan perubahan pola pikir masyarakat Melayu yang cenderung mengadopsi norma-norma global tanpa menyaring relevansi dengan tradisi local (Ibrahim, 2015).

Melayu Baru sebagai Alternatif Adaptif

Dalam konteks globalisasi, Melayu Baru menawarkan perspektif yang adaptif, yang mengintegrasikan nilai-nilai tradisional ke dalam kerangka modernitas tanpa kehilangan akar budaya. Pendekatan ini menegaskan bahwa tradisi lokal dapat menjadi sumber daya strategis untuk menghadapi tantangan global.

Konsep Tradisi sebagai Aset

a. Adat yang sebenar adat memberikan landasan moral universal yang relevan untuk menciptakan masyarakat berkeadilan.

b. Adat yang diadatkan memungkinkan penyesuaian norma sosial-politik

dengan dinamika global tanpa meninggalkan prinsip inti.

c. Adat yang teradat mencerminkan fleksibilitas tradisi dalam merespons perubahan zaman (Alatas, 1977).

Tradisi Lokal dalam Perspektif Global

Melayu Baru memposisikan tradisi seperti musyawarah dan gotong royong sebagai nilai-nilai unik yang dapat digunakan untuk menghadapi globalisasi:

a. Musyawarah sebagai Model Demokrasi

   Musyawarah, sebagai mekanisme pengambilan keputusan kolektif, memiliki relevansi dalam membangun model demokrasi yang inklusif. Tradisi ini dapat diterapkan dalam konteks global sebagai kerangka deliberatif yang mendorong partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat.

b. Gotong Royong dalam Pembangunan Sosial

   Gotong royong dapat diterjemahkan ke dalam program pembangunan komunitas modern yang berbasis pada kolaborasi dan solidaritas sosial, seperti inisiatif koperasi atau pembangunan berbasis masyarakat (Milner, 2011).

Respon Melayu Baru terhadap Neoliberalisme

Melayu Baru memberikan kritik terhadap nilai-nilai neoliberal yang mendominasi globalisasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan budaya. Alatas (1977) mencatat bahwa neoliberalime, dengan penekanan pada efisiensi pasar, sering kali mengorbankan nilai-nilai sosial dan budaya.

Sebagai alternatif, Melayu Baru menawarkan paradigma pembangunan yang berbasis pada nilai kolektif seperti kesetaraan, keadilan, dan solidaritas sosial. Tradisi lokal digunakan sebagai

dasar untuk menciptakan strategi adaptif yang tetap menghormati nilai-nilai lokal.

Relevansi dalam Konteks Komunitas Global

Pendekatan Melayu Baru tidak hanya relevan untuk masyarakat Melayu tetapi juga memiliki potensi untuk diaplikasikan pada komunitas budaya lainnya. Dengan mengintegrasikan tradisi ke dalam modernitas, pendekatan ini memberikan kerangka untuk menciptakan modernitas yang lebih inklusif, berakar pada nilai-nilai lokal, dan berkelanjutan (Eisenstadt, 2000).

Pendekatan ini juga menawarkan solusi untuk tantangan global seperti:

a. Krisis Identitas Budaya: Dengan memanfaatkan tradisi sebagai aset, masyarakat dapat mempertahankan identitas mereka dalam arus globalisasi.

b. Ketimpangan Sosial: Nilai-nilai kolektif seperti gotong royong dan musyawarah dapat digunakan untuk mengatasi ketimpangan sosial dan mendorong pembangunan yang inklusif.

Dalam era globalisasi, Melayu Baru memberikan alternatif yang relevan untuk mempertahankan identitas budaya sambil tetap beradaptasi dengan dinamika modernitas. Tradisi tidak dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai elemen strategis dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan adat dan nilai lokal ke dalam kerangka modernitas, Melayu Baru memberikan panduan bagi masyarakat Melayu dan komunitas lain untuk menghadapi tantangan global tanpa kehilangan esensi budaya.

Penutup

Konsep Melayu Baru sebagai falsafah sosial menawarkan kerangka yang komprehensif dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi. Dengan memadukan tradisi dan modernitas, Melayu Baru memberikan pendekatan unik yang menegaskan bahwa adat bukanlah sekadar warisan budaya, tetapi juga alat emansipasi yang dinamis. Prinsip-prinsip universal dalam adat, seperti keadilan, kesetaraan, dan kolektivitas, memberikan landasan moral

untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai upaya rekonstruksi sosial, Melayu Baru menempatkan pendidikan, *akalbudi*, dan nilai-nilai tradisional sebagai pilar utama dalam membangun masyarakat yang progresif. Tradisi seperti gotong royong dan musyawarah menjadi contoh nyata bagaimana nilai-nilai lokal dapat diadaptasi untuk menjawab kebutuhan zaman, sekaligus memperkuat identitas budaya.

Namun, implementasi konsep Melayu Baru bukan tanpa tantangan. Penetrasi nilai-nilai neoliberal dan homogenisasi budaya global memerlukan upaya kolektif untuk menjaga relevansi tradisi lokal. Pendidikan berbasis nilai dan kebijakan yang mendukung pelestarian budaya menjadi kunci untuk memastikan bahwa rekonstruksi sosial tidak hanya berorientasi pada pembangunan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan budaya.

Melalui pendekatan yang holistik, Melayu Baru tidak hanya relevan bagi masyarakat Melayu tetapi juga dapat menjadi model untuk komunitas budaya lain yang menghadapi tekanan serupa akibat globalisasi. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai tradisional ke dalam kerangka modernitas, Melayu Baru memberikan panduan untuk menciptakan masyarakat yang bermartabat, adaptif, dan berdaya saing dalam era global. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan lebih lanjut dalam bentuk studi empiris untuk mengeksplorasi aplikasi praktis konsep ini dalam berbagai konteks sosial-budaya.

Daftar Referensi

Buku

Abdullah, W. M. (1985). *The Idea of Malay Civilization*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.

Alatas, S. H. (1977). *The Myth of the Lazy Native*. London: Frank Cass.

Appadurai, A. (1996). *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Effendy, T. (1993). *Adat dan Tradisi Melayu*. Pekanbaru: Yayasan Tuah Negeri.

Eisenstadt, S. N. (2000). "Multiple Modernities." *Daedalus*, 129(1), 1–29.

Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. New York: Basic Books.

Giddens, A. (1991). *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*. Cambridge: Polity Press.

Ibrahim, A. (2015). *Melayu Antara Tradisi dan Moderniti*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Milner, A. C. (2011). *The Malays*. Wiley-Blackwell.

Pisarev, D. (1864). *Essays on Rationalism and Ethics*. Moscow: Academic Press.

Artikel Jurnal

Abdullah, W. M. (2016). "Tradisi dan Modernisasi: Peranan Adat dalam Masyarakat Melayu Kontemporer." *Jurnal Sosiologi Budaya*, 8(2), 127–139.
Ibrahim, A. (2017). "Adat dan Transformasi Sosial: Perspektif Melayu Baru." *Southeast Asian Studies Journal*, 45(3), 321–340

Alatas, S. F. (2006). "Intellectuals in Developing Societies: The Malay Experience." *International Sociology*, 21(5), 565–589.

Appadurai, A. (1997). "Global Ethnoscapes: Notes and Queries for a Transnational Anthropology." *Cultural Anthropology*, 7(2), 191–210.

Effendy, T. (2018). "Adat dalam Dinamika Modernisasi: Perspektif Kebudayaan Melayu." *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(1), 45–58.

Eisenstadt, S. N. (2000). "Multiple Modernities: The Perspective of Modernization Reconsidered." *International Sociology*, 15(2), 233–244.

Geertz, C. (1973). "Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture." *The Interpretation of Cultures*, 3(1), 5–30.

Giddens, A. (1994). "Living in a Post-Traditional Society." *Theory, Culture & Society*, 11(2), 79–102.

Hassan, R. (2013). "Cultural Adaptation and Globalization: A Case Study of the Malay Identity." *Journal of Southeast Asian Studies*, 24(3), 357–375.

Milner, A. C. (2015). "The Malays and the Global Challenge: Tradition Meets Modernity." *Asian Cultural Studies*, 12(1), 15–28.